

Masalah Sumba Barat dan Harapan Reza untuk Perubahan

Menanggalkan identitasnya sebagai aktor dan mengenakan baju bertuliskan YAPPIKA-ActionAid, Reza Rahadian mulai menjalankan tugasnya sebagai Duta Persahabatan. Setelah 2 tahun absen mengunjungi wilayah kerja YAPPIKA-ActionAid karena pandemi, akhir Mei 2022 lalu Reza berangkat ke Sumba Barat untuk melihat keadaan sekolah-sekolah dampingan Program Sekolah Aman. Reza bersama tim YAPPIKA-ActionAid menyambangi SDN Palamoko, SDN Rajaka dan bertemu Bupati Sumba Barat beserta jajarannya.

Permasalahan infrastruktur pendidikan di Sumba Barat tak kunjung usai. Ruang kelas rusak, nutrisi dan gizi anak yang tidak tercukupi, dan layanan sekolah yang belum dapat diakses sebagian kelompok masyarakat masih menjadi rapor merah bagi pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Masalah ini terutama dirasakan oleh anak-anak penyandang disabilitas, berasal dari keluarga miskin, serta berlatar belakang agama/kepercayaan minoritas. Reza pun berkesempatan melihat persoalan tersebut secara langsung melalui interaksi dengan komunitas sekolah dan anak-anak yang mengalami eksklusi tersebut.

Dalam pertemuannya dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat, Reza menyampaikan skema Program Sekolah Aman dan Inklusif yang diimplementasikan oleh YAPPIKA-ActionAid di tahun 2022 ini. Skema ini mencakup advokasi perbaikan sekolah rusak, membuat rintisan sekolah inklusif, serta membuat kebun gizi untuk memenuhi kecukupan nutrisi anak. Reza juga menceritakan kendala yang ditemukan dalam kunjungannya ke sekolah, salah satunya tentang kondisi ruang kelas SDN Palamoko yang telah

mengalami kerusakan selama 10 tahun. Ia mendorong pemerintah daerah Sumba Barat untuk segera memberikan penanganan nyata terhadap persoalan tersebut.

“Kita sama-sama ketahui bahwa sekolah yang dianggap baik atau sekolah inklusif yang digagas oleh teman-teman YAPPIKA adalah sekolah yang tidak hanya aman dan nyaman, tapi juga sekolah yang punya arah bagaimana kesehatan para siswanya, sanitasi air bersih, dan fasilitas yang mendukung sekolah tersebut juga perlu diperhatikan,” ucap Reza di Rumah Dinas Bupati Sumba Barat.

Reza pun berharap ada dorongan lebih kuat dari pihak pemerintah untuk menindaklanjuti masalah secara komprehensif, tepat sasaran, dan sesegera mungkin. Hal ini mutlak diperlukan untuk perbaikan kualitas pendidikan di Kabupaten Sumba Barat, terutama dalam penyediaan lingkungan sekolah yang aman bagi anak-anak.





Wali Murid Antusias Mengelola Kebun Gizi

Jam menunjukkan pukul 5 pagi. Di ujung barat Sumba, anak-anak SD Inpres Hoba Jangi bergegas berangkat ke sekolah. Masih menggunakan baju rumah, mereka menyirami tunas sayuran yang mulai bersemi di petakan kebun di halaman sekolah. Usai mengerjakan tugas tersebut, anak-anak kembali ke rumah untuk mandi dan bersiap-siap untuk belajar di sekolah. Hal ini menjadi rutinitas baru sejak hadirnya kebun gizi di area sekolah pada Maret lalu.

Damaris Bangi Reha, salah satu orang tua siswa SD Inpres Hoba Jangi yang anaknya kini duduk di kelas 2. Sehari-hari, ia mengurus kebutuhan rumah tangga dan merawat kebun sayur milik pribadi. Ibu yang sehari-hari disapa Mama Damaris ini, kini aktif terlibat dalam pengelolaan kebun gizi di tingkat sekolah dan komunitas. Semenjak tergabung dalam komunitas sekolah, Mama Damaris merasakan perubahan dalam kehidupannya.

Pelatihan yang diberikan oleh perwakilan Dinas Pertanian Sumba Barat membuat komunitas sekolah tercerahkan tentang hal-hal dasar mengelola kebun, mulai dari cara membuat pupuk bekas hingga mengidentifikasi masalah tanaman yang diserang hama. Tak hanya itu, pengetahuan komunitas sekolah semakin bertambah setelah mendapat pemaparan tentang kebutuhan gizi anak dan bagaimana cara memasak hasil kebun agar anak terhindari dari ancaman stunting.



Semakin ada kedekatan antara orang tua, anak, dan guru-guru di sini dengan adanya kebun gizi.

Damaris Bangi Reha, anggota komunitas sekolah SD Inpres Hoba Jangi

Rasa senang dan antusias menjadi penggerak bagi 30 anggota komunitas sekolah untuk mempraktikkan ilmu yang telah diperoleh. Setiap harinya, perwakilan komunitas merawat kebun gizi di sekolah sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

Murid kelas 5 dan 6 juga diberi tanggung jawab untuk mengelola masing-masing 1 petak tiap anak. Sedangkan anak-anak kelas lainnya bertugas membersihkan area kebun dan menyirami tanaman.

“Dengan adanya kebun gizi, kami dapat belajar bersama dengan anak. Jadi tahu kondisi gizi anak kami seperti apa,” ungkap Mama Damaris.

Penyediaan kebun gizi di sekolah dan area komunitas merupakan pengembangan pilar Sekolah Aman dari ancaman gizi buruk. Harapannya, kebun gizi ini bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari dan dikonsumsi bersama. Namun lebih dari itu, kebun gizi ini telah mempererat hubungan antara orang tua, anak, dan pihak sekolah. Jika sebelumnya orang tua hanya berinteraksi dengan guru saat penerimaan rapor dan rapat orang tua siswa, kini mereka bertemu secara rutin di kebun gizi sekolah. Anak-anak pun gembira melihat orang tuanya datang ke sekolah dan berkegiatan bersama.

Mama Damaris berharap kegiatan kebun gizi dapat terus berlanjut serta komunitas sekolah tetap semangat untuk berkegiatan demi kesehatan anak-anak dan bersama.

YAPPIKA-ActionAid Berikan Bantuan Teknis dan Penguatan Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil di 32 Kabupaten/Kota

YAPPIKA-ActionAid memberikan dukungan peningkatan kapasitas kepada Lead Partners dan Learning Forum di 32 kabupaten/kota melalui kegiatan virtual training dan mentoring yang dilakukan pada periode bulan September 2021 sampai dengan Maret 2022. Sebagai salah satu organisasi Mitra Penyedia Technical Assistant (TA) Program MADANI, YAPPIKA-ActionAid memberikan bantuan teknis dan peningkatan kapasitas dengan tema akuntabilitas sosial, advokasi kebijakan, dan pengorganisasian komunitas untuk mendukung kerja-kerja advokasi.

Training pertama dengan tema Akuntabilitas Sosial diikuti 230 orang, dengan komposisi gender yang hampir berimbang yaitu 109 perempuan (47%) dan 121 laki-laki (53%). Berdasarkan pilah usia, 135 peserta (59%) berusia lebih dari 35 tahun. Hanya 6% peserta (13 orang) yang berusia di bawah 25 tahun. Pada kegiatan *training* ini ada satu peserta disabilitas tuli dari Kota Tangerang, sehingga pada kegiatan tersebut YAPPIKA-ActionAid menyediakan juru bahasa isyarat untuk memastikan inklusifitas kegiatan. Sebanyak 101 peserta merupakan perwakilan dari unsur Lead Partners (LP), 47 orang adalah unsur Learning Forum (LF).

Peserta training belajar mengenai konsep tata kelola pemerintahan yang demokratis, pelayanan publik inklusif dan keterampilan menyusun instrumen sederhana akuntabilitas sosial dalam upaya mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Hasil analisa pre-test dan post-test memperlihatkan adanya peningkatan kapasitas setiap peserta dalam aspek pengetahuan secara signifikan, yaitu sebanyak 84% peserta mengalami peningkatan pengetahuan tentang pentingnya akuntabilitas sosial dan tata kelola pemerintahan yang demokratis, urgensi membuka ruang partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, serta mengenali berbagai instrumen akuntabilitas sosial dalam pelayanan publik.

Training kedua dengan tema advokasi kebijakan diikuti 196 orang, dengan komposisi gender yang hampir berimbang yaitu 93 perempuan (46%) dan 103 laki-laki (54%). Berdasarkan pilah usia, mayoritas peserta (69%) berusia lebih dari 30 tahun yaitu sebanyak 138 peserta, dan 12% peserta (23 orang) yang berusia di bawah 25 tahun, serta ada 2 remaja perempuan dari Kalimantan Barat berusia 15 dan 19 tahun.

Pada kegiatan training tematik kedua ini, ada tiga peserta disabilitas tuna daksa dari Kota Tangerang. Sebanyak 7 orang peserta (4 perempuan dan 3 Laki-laki) yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berasal dari Learning Forum di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan Jawa Tengah, selebihnya berstatus non-PNS. Sebanyak 86 peserta merupakan perwakilan dari unsur Lead Partners (LP), 42 orang adalah unsur Learning Forum (LF).

Merujuk pada hasil perbandingan skor pre-test dan post-test, sebanyak 64% peserta meningkat pengetahuan dalam hal memahami konsep advokasi berbasis bukti, pentingnya berjejaring dan penyusunan Policy Brief dalam kerja – kerja advokasi, memahami manfaat pemetaan pemangku kepentingan dan aktor-aktor strategis, mengetahui syarat-syarat kualitas kebijakan publik, serta pengemasan isu dan kampanye kreatif.

Training ketiga dengan tema pengorganisasian diikuti 168 orang, dengan komposisi gender yang hampir berimbang yaitu 83 perempuan (49%) dan 85 laki-laki (51%). Berdasarkan pilah usia, mayoritas peserta (75%) berusia lebih dari 30 tahun yaitu sebanyak 126 peserta, sebanyak 10% peserta (16 orang) yang berusia di bawah 25 tahun. Pada kegiatan training tematik ketiga ini, ada satu peserta disabilitas tuna daksa dari Yayasan Difabel Mandiri, Kota Tangerang.

Sebanyak 4 orang peserta perempuan, bekerja sebagai Pegawai Negari Sipil (PNS) berasal dari Learning Forum di Provinsi Jawa Timur dan Banten, selebihnya berstatus non-PNS. Sebanyak 82 peserta merupakan perwakilan dari unsur Lead Partners (LP), 26 orang adalah unsur Learning Forum (LF).

Peserta training telah mendapatkan kapasitas baru mengenai pengorganisasian dan mobilisasi komunitas untuk mendukung kerja-kerja advokasi, mampu melakukan pemetaan kapasitas aktor di tingkat komunitas, serta menyusun rencana aksi dan strategi ketangguhan komunitas yang didampingi. Jika dilihat dari hasil skor pre-test dan post-test, terjadi peningkatan sebanyak 56% terkait pengetahuan mengenai fungsi relasi/hubungan untuk mengetahui mitra kunci yang mendukung dan menghambat kerja-kerja komunitas,

siklus pengorganisasian, serta memahami tahapan analisis sosial yaitu mulai dari persiapan, kunjungan lapangan, pemilahan data, penentuan masalah, prioritas masalah dan mengidentifikasi akar masalah, dan pemahaman dalam unsur-unsur pendukung ketangguhan komunitas.

Secara keseluruhan training tematik akuntabilitas sosial, advokasi kebijakan dan pengorganisasian komunitas telah memberikan pembelajaran yang baik terhadap pengembangan kapasitas organisasi, terutama pada tataran melakukan pengawasan pelayanan publik dengan instrumen monitoring yang tepat sesuai isu tematik menjadi pengalaman baru bagi sebagian besar peserta yang bekerja di ranah pemberdayaan masyarakat.

Proses advokasi kebijakan berbasis bukti melalui penyusunan Policy Brief juga mempengaruhi strategi organisasi dalam mendorong agenda-agenda kebijakan publik. Ada beberapa isu tematik yang menjadi sebuah isu baru dalam kerja-kerja harian peserta sehingga hal ini membantu mereka dalam memperluas jangkauan kerja, penerima manfaat dan jejaring baru. Hal ini secara otomatis berdampak pada legitimasi baru dari berbagai pihak terhadap keberadaan organisasi Lead Partners (LP) dan Learning Forum (LF).

Strategi Mendorong Perlindungan dan Perluasan Masyarakat Sipil di Indonesia

Advokasi internasional merupakan salah satu strategi yang telah dilakukan dan terus dikembangkan oleh YAPPIKA-ActionAid (YAA) untuk mendorong perbaikan lingkungan pendukung yang lebih kondusif bagi organisasi masyarakat sipil (OMS) di Indonesia. Pada tahun 2022, YAA memberikan masukan kepada Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Kebebasan Berkumpul secara Damai dan Berserikat mengenai tren, perkembangan, dan tantangan kemampuan OMS Indonesia untuk mengakses sumber daya, termasuk pendanaan dari luar negeri. YAA juga terlibat dalam jaringan nasional guna menyusun laporan alternatif Tinjauan Periodik Universal (Universal Periodic Review -UPR) Siklus ke-4 untuk Indonesia.

Dalam kiprahnya YAA terlibat dalam tiga jaringan nasional yaitu Koalisi OMS Indonesia untuk Advokasi UPR, Koalisi OMS Indonesia untuk Advokasi UPR pada Hak-Hak Perempuan, serta CIVICUS dan ELSAM.

Pada jaringan nasional untuk Advokasi UPR, YAA menyusun laporan untuk isu hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat, serta isu pendidikan.

Pada Koalisi OMS Indonesia untuk Advokasi UPR pada Hak-Hak Perempuan, YAA menyusun laporan untuk isu perempuan dan bencana. Sedangkan dalam kolaborasi dengan CIVICUS dan ELSAM, YAA menyusun laporan mengenai ruang sipil (civic space) meliputi hak atas kebebasan berserikat, hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak berekspresi dan kebebasan pers, serta perlindungan terhadap pembela HAM, aktivis masyarakat sipil, dan jurnalis.

Selain itu, YAA bersama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan Yayasan Penabulu menjadi inisiator untuk membentuk Sub Kelompok Kerja Ruang Sipil (Sub Working Group Civic Space) dalam Civil20 (C20). Tidak hanya itu, YAA juga terlibat dalam dua kelompok kerja C20 lainnya, antara lain Kelompok Kerja Pembangunan dan Kemanusiaan dan Kelompok Kerja Akses Vaksin dan Kesehatan Global. Pada Sub Kelompok Kerja Ruang Sipil terdapat 3 agenda atau rekomendasi utama yang didorong yaitu: perlindungan dan perluasan ruang sipil, mengakhiri serangan, kriminalisasi, dan stigmatisasi bagi aktor masyarakat sipil, dan membangun serta memperkuat kemitraan dengan aktor masyarakat sipil dalam pembuatan kebijakan publik dan pengambilan keputusan.



Silahkan unduh Policy Brief C20 Sub-Working Group Civic Space disini!

bit.ly/PolicyBriefC20CivicSpace

Promosikan Prinsip Toleransi dan Keberagaman, YAPPIKA-ActionAid Rekrut Anak Muda Jadi Relawan ANEKA RAGAM

Wajah orang muda adalah wajah masa lalu, masa kini dan masa depan kita. Upaya mendorong lingkungan pendukung yang kondusif bagi tumbuhnya masyarakat sipil di Indonesia, tentunya akan semakin sulit tanpa urun daya dari anak muda. YAPPIKA-ActionAid percaya, aksi kolektif dengan anak muda merupakan investasi terbaik untuk dapat mengarusutamakan prinsip toleransi, keberagaman dan penghormatan terhadap hak asasi manusia secara lebih luas. YAPPIKA-ActionAid merekrut anak-anak muda bergabung dalam kegiatan sukarelawan Arena Ekspresi Anak Muda untuk Keberagaman atau ANEKA RAGAM. Kegiatan ini membuka kesempatan bagi anak muda dari berbagai latar-belakang untuk dapat terlibat dalam kerja-kerja YAPPIKA-ActionAid serta mengembangkan kapasitas mereka dalam merawat keberagaman di Indonesia.

Tahun 2021 menjadi halaman pertama ANEKA RAGAM. Bekerja sama dengan 5 (lima) orang anak muda, inisiatif ini kemudian telah mampu titik temu dan mereka-cipta beragam material produk kampanye mengenai isu toleransi, kesetaraan gender, mitigasi bencana dan kebebasan sipil. Tim sukarelawan ANEKA RAGAM juga berkolaborasi dengan komunitas remaja perempuan Desa Tamanjaya untuk mentransformasikan hasil riset mereka menjadi material komunikasi.



Salah satu sukarelawan ANEKA RAGAM Rafi Sihabudin mengatakan kegiatan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kapasitasnya dalam memahami isu-isu keberagaman. “Saya senang sekali bisa bergabung dengan kawan-kawan volunteer ANEKA RAGAM. Di sana, saya bisa berproses dan berkembang untuk menambah kapasitas mengenai isu-isu keberagaman melalui produksi kampanye di media sosial. Selain itu, saya juga mendapatkan hal baru mengenai keberagaman. bahwa, kita itu sangat erat dekatnya dengan keberagaman. Indonesia ada karena keberagaman.” Kata Rafi Sihabudin yang bergabung sebagai relawan tahun 2021.

“Pelokalan Aksi Ketangguhan Bencana yang Dipimpin oleh Perempuan dan Anak Muda: Jalan Menuju Kerangka Kerja Sendai”

YAPPIKA-ActionAid bersama **Federasi ActionAid** Internasional menyelenggarakan kegiatan “Pelokalan Aksi Ketangguhan Bencana yang Dipimpin oleh Perempuan dan Anak Muda: Jalan Menuju Kerangka Kerja Sendai” pada 25 Mei 2022, di Nusa Dua, Bali. Kegiatan ini merupakan acara khusus yang dilaksanakan perwakilan ActionAid Internasional yang berasal dari berbagai negara, yaitu Indonesia, Bangladesh, Kamboja, Vietnam, Malawi, Nepal, Inggris, dan Palestina, serta melibatkan pemerintah, perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Masyarakat Sipil, dan pemangku kepentingan. Pertemuan ini membahas implementasi Kerangka Kerja Sendai dalam pelaksanaannya di tingkat lokal hingga global dalam memperkuat upaya ketangguhan terhadap bencana yang melibatkan perempuan dan pemuda.

Pada perhelatan ini **Reza Rahadian Matulesy, Duta Persahabatan YAPPIKA-ActionAid**, menyampaikan pidato kunci tentang proses pelokalan aksi ketangguhan bencana. Proses tersebut harus memberdayakan segmen populasi yang paling rentan, terutama perempuan dan kaum muda. Selain itu, Reza juga mengajak seluruh peserta yang hadir untuk merumuskan gerakan yang mendukung isu kepemimpinan perempuan pada aksi kemanusiaan.

“Saya ingin menekankan pada masalah yang berkaitan dengan pergeseran kekuasaan. Ini adalah agenda yang kami anjurkan dalam arti sebenarnya.

Memberikan kesempatan kepada warga agar mereka dapat mengambil keputusan sendiri yang kemudian didukung/dibiayai oleh pemerintah dan lembaga pembangunan. Proses pergeseran kuasa melalui peningkatan kapasitas harus difasilitasi”, tegas Reza dalam pidato pembukaannya.

Dalam diskusi panel bersama perwakilan ActionAid Internasional dari Bangladesh, Nepal, Palestina, dan Kepulauan Fiji. **Direktur Tata Ruang, Pertanahan dan Penanggulangan Bencana BAPPENAS, Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA. Ph.D** mengatakan indikasi kesuksesan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) adalah meningkatnya keterlibatan dan peran perempuan dalam pemberdayaan komunitas.



“Kunci kesuksesan adopsi PRB adalah keterlibatan perempuan. Strateginya adalah memperbanyak program lewat kementerian, pemerintah bekerja sama dengan NGO, badan pembangunan PBB dan organisasi-organisasi lain dalam tata kelola PRB, serta memfasilitasi pemerintah lokal untuk meningkatkan gender-based planning PRB”, kata Sumedi.

Hal senada dikatakan oleh **Country Director ActionAid Bangladesh, Farah Kabir** yang mengatakan bahwa perempuan adalah perespon pertama saat terjadi bencana. Namun, perempuan kebanyakan berperan di belakang layar. Mereka berjuang melindungi anak-anak saat bencana terjadi, misalnya saat banjir datang, mereka akan lebih dulu berjuang menyelamatkan anak-anaknya.



Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA. Ph.D

“Kami bekerja dengan perempuan untuk memastikan sumber daya yang mereka punya. Kami juga mengenalkan kepada anak-anak muda mengenai bencana dan bagaimana menghadapi bencana sehingga mereka lebih sigap memberikan bantuan saat bencana datang”, kata Farah Kabir.

Dalam kesempatan ini, hadir juga Imas Mas'iyah, perwakilan komunitas dari Desa Tamanjaya Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang. Guru di SDN Tamanjaya 2 ini menceritakan keterlibatan warga di desanya sebagai contoh pelokalan PRB. Guru dan wali siswa SDN Tamanjaya 2 didampingi oleh YAPPIKA-ActionAid membentuk Komunitas Sekolah Aman Bencana Berbasis Masyarakat (Kassabar) pasca tsunami Selat Sunda.

Sekolah ini turut terdampak tsunami karena lokasinya yang berada di bibir pantai. Menurut Imas, Kassabar mengadakan simulasi bencana dan pelatihan kebencanaan kepada siswa dan wali siswa, serta membuat jalur evakuasi. Komunitas sekolah juga mengajukan kepada Kemedikbudpora Kabupaten Pandeglang agar materi kebencanaan menjadi muatan lokal dalam pembelajaran di sekolah.

Pemerintah Kabupaten Pandeglang terkesan dengan ketangguhan komunitas sekolah dalam menghadapi bencana sehingga sekolah-sekolah yang berada di kawasan rawan bencana membentuk komunitas yang disebut Kostana (Komunitas Sekolah Tangguh Bencana).

Menutup perhelatan, Direktur Eksekutif YAPPIKA-ActionAid Fransiska Fitri mengatakan bahwa acara ini adalah kesempatan emas untuk saling berbagi pengalaman dan strategi pelibatan perempuan dan pemuda dalam PRB antar negara yang memiliki kemiripan latar belakang situasi kebencanaan.



Fransiska Fitri

Pergeseran Kekuasaan dan Agenda Pelokalan dalam Krisis Kemanusiaan dari Indonesia dan Palestina

YAPPIKA-ActionAid terlibat sebagai salah satu pengisi acara di Rumah Resiliensi Indonesia (RRI) pada 26 Mei 2022 di Gedung Art Bali, Area Bali Collection, Nusa Dua Bali. Di RRI ini, YAPPIKA-ActionAid membuat kegiatan Panggung Resiliensi dengan tema “Membangun Kekuatan Bersama: Pergeseran Kekuasaan dan Agenda Pelokalan dalam Krisis Kemanusiaan dari Indonesia dan Palestina” dengan dua pembicara utama yaitu Siti Atiah (Tim Peneliti yang Dipimpin Remaja Perempuan, Pandeglang) dan Ibrahim Ibraigheth (Direktur ActionAid Palestina). Host dari kegiatan ini adalah Richa Syapitri (Staf Program Aksi Kemanusiaan dan Resiliensi YAPPIKA-ActionAid). Kegiatan ini bertujuan untuk berbagi dan bertukar pembelajaran dalam konteks aksi kemanusiaan dari Indonesia dan Palestina, serta aksi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di akar rumput yang dipimpin oleh perempuan dan anak muda.

Petisi untuk Presiden Indonesia dari Remaja Desa Tamanjaya

Pada awal presentasi, Atiah menjelaskan mengenai kondisi desanya yang terkena dampak tsunami Selat Sunda pada 2018, Desa Tamanjaya di Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

Di Desa Tamanjaya, tidak terdapat SMA dan hanya terdapat 3 TK, 3 SD, 1 Madrasah Ibtidaiyah, 1 SMP, dan 1 Madrasah Tsanawiyah. SMA terdekat dari Desa Tamanjaya terletak di kecamatan yang berjarak sekitar 20 km dan ditempuh dengan waktu kurang lebih 45 – 60 menit. Sebelum tsunami pun, jalan di Desa Tamanjaya rusak dan belum juga diperbaiki hingga saat ini. Hal ini membuat anak dan remaja di desanya kesulitan untuk mengakses pendidikan, khususnya SMA, dan pelayanan kesehatan. Transportasi umum menuju kecamatan juga sangat terbatas dan hanya tersedia pada pukul 5 pagi.



Atiah menjelaskan, “Kami (remaja) di Tamanjaya ingin melanjutkan sekolah ke SMA, banyak orang tua yang memilih menyekolahkan anaknya di pondok pesantren yang terletak di kecamatan lain. Alasannya, pertama, lebih aman dan tidak perlu bolak-balik dari rumah ke sekolah setiap hari karena jalan yang rusak dan transportasi umum yang terbatas. Kedua, biaya akan lebih murah, baik untuk transportasi dan akomodasi”, jelas Atiah.

Atiah juga menjelaskan, “kondisi remaja perempuan di Tamanjaya kesulitan untuk melanjutkan pendidikan karena kurangnya keuangan. Norma sosial di masyarakat juga masih mengutamakan anak laki-laki untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi karena laki-laki nantinya akan jadi kepala keluarga dan pencari nafkah utama keluarga.

Dalam kondisi pandemi sekitar dua tahun terakhir, banyak teman saya yang juga anak perempuan di Desa Tamanjaya telah putus sekolah dan mulai bekerja di kota sebagai pekerja rumah tangga, seperti di Serang, Tangerang, dan Jakarta”.

Hal ini karena banyak keluarga yang mengalami keterpurukan kondisi keuangan. Putus sekolah meningkatkan kerentanan dan risiko bagi remaja perempuan menjadi pekerja anak, terutama karena bekerja di sektor informal dan minimnya perlindungan hukum.

Dalam aspek bebas dari kekerasan, Atiah menceritakan banyaknya pernikahan anak yang terjadi di Desa Tamanjaya karena kehamilan dini dan tidak direncanakan, kemudian karena rasa malu banyak orang tua yang mendorong perkawinan anak untuk menghindari perzinahan.

“Terbatasnya akses & layanan atas kesehatan seksual dan reproduksi untuk remaja perempuan, pendidikan mengenai hak atas kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR) tidak diajarkan di sekolah meningkatkan kerentanan kami. Puskesmas hanya ada di kecamatan dan berjarak sekitar 20 km dengan bidan adalah satu-satunya akses untuk memberikan pelayanan kesehatan di masyarakat. Kegiatan Posyandu yang berjalan di desa pun sebagian besar untuk ibu dan balita sehingga sering meninggalkan remaja perempuan yang sering membutuhkan informasi mengenai layanan kesehatan seksual. Selain itu, terdapat persepsi bahwa remaja perempuan hanya boleh mengakses layanan kesehatan seksual dari bidan jika sudah menikah atau punya anak,” jelasnya.



Kemudian, Atiah menjelaskan pertemuan antara 14 remaja perempuan Desa Tamanjaya dengan YAPPIKA-ActionAid (YAA). Mereka diajak dan dilatih sebagai peneliti dalam penelitian yang dipimpin oleh remaja perempuan. Tema pelatihan yang diberikan seperti menyiapkan ruang aman dan mendukung untuk teman sebaya; mengeksplorasi relasi gender dan kekuasaan; memahami pendekatan partisipatif feminis dan penelitian feminis, serta lainnya.

Setelah itu, para peneliti remaja perempuan tersebut membuat kampanye publik dengan Instagram Live dengan YAPPIKA-ActionAid, menyosialisasikan hasil temuan kepada pemuda di desa dan siswa di sekolah, serta mengomunikasikannya dengan kepala desa untuk mendorong regulasi yang responsif gender. “Kami juga berharap para pemangku kepentingan untuk memperbaiki infrastruktur, seperti jalan dan sekolah, serta menyediakan ruang aman bagi perempuan. Kami, para remaja Desa Tamanjaya, juga membuat petisi untuk Presiden Indonesia untuk mendorong perbaikan jalan desa agar kami lebih mudah dalam mengakses pendidikan dan layanan kesehatan.”

Kohesi Sosial, Keterhubungan Warga, dan Kepemimpinan di Tingkat Lokal Merupakan Kunci Memperkuat Ketangguhan Komunitas

Pada awal pemaparannya, Ibrahim menjelaskan bahwa situasi di wilayah Palestina tetap rapuh, dengan warga Palestina yang rentan terhadap berbagai ancaman politik, keamanan, sosial, dan ekonomi, serta ditambah dengan kekerasan yang berulang. Pendudukan Palestina yang berkepanjangan menyebabkan 2,45 juta warga Palestina membutuhkan bantuan kemanusiaan, termasuk pengungsi di 19 kamp di Tepi Barat dan Gaza, serta mereka yang terus-menerus terancam pemindahan paksa di Area C. Lebih dari 1,5 juta warga Palestina terkena dampak terhadap terbatasnya akses ke pelayanan dasar, termasuk layanan di bidang kesehatan, pendidikan, air dan sanitasi, di mana mencakup 97% warga Palestina di Gaza tidak dapat mengakses air minum yang aman dan portabel.

“Minimnya akses dan penguasaan sumber daya alam (darat, air, dan laut) berdampak pada seluruh aspek kehidupan warga Palestina”, jelas Ibrahim. Meskipun 85% tanah subur berada di Area C, pencaplokan yang sedang berlangsung dan pemindahan paksa telah menekan peluang mata pencaharian berkelanjutan seperti halnya

pemindahan komunitas Palestina di Humza Al Bqai’a dan kontrol atas ruang maritim di Gaza. Dari situasi dan kondisi tersebut, Ibrahim menjelaskan bahwa salah satu dukungan ketangguhan yang dilakukan oleh ActionAid adalah memberikan pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh warga. ActionAid Palestine mendukung perempuan dan anak muda dengan inisiatif pembersihan jalan di Gaza yang disponsori oleh pemerintah setempat. Hal ini merupakan contoh peningkatan kapasitas dari risiko menuju ketangguhan. Kohesi sosial dan keterhubungan warga adalah kunci untuk memperkuat ketangguhan komunitas dari guncangan dan tekanan. Hal ini membutuhkan tekad dan kemitraan dengan para aktor dari tingkat lokal hingga nasional untuk memperkuat kepemimpinan lokal guna membangun komunitas yang lebih kuat dan tangguh. *“Konflik adalah salah satu bencana yang disebabkan oleh manusia, dan politik yang baik adalah penting untuk memastikan hak-hak nasional dan global Palestina dalam martabat dan kebebasan seperti orang lain”,* tutup Ibrahim.

Komitmen YAPPIKA-ActionAid dalam Memperkuat Kepemimpinan Perempuan dan Anak Muda

YAPPIKA-ActionAid berkomitmen untuk memperkuat kepemimpinan perempuan dan anak muda sebagai strategi untuk memajukan kesetaraan gender, keadilan sosial dan pengurangan kemiskinan, termasuk dalam situasi bencana dengan berpartisipasi dalam Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) yang diselenggarakan pada 23-27 Mei di Bali, Indonesia. YAPPIKA-ActionAid juga tergabung dalam Forum Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Bencana yang merupakan kolaborasi dari berbagai organisasi negara dan non-negara termasuk lembaga internasional (The Women’s International Network on Disaster Risk Reduction atau disingkat WIN DRR).

Secara khusus, dalam dua tahun ke depan (2022 - 2024), Forum Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Bencana berkomitmen untuk mendukung Implementasi Rencana Aksi dalam Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) terhadap Sendai Frameworks pada 2024, yaitu:

- Memfasilitasi dialog, kemitraan, dan adopsi kebijakan di dalam pemerintah dan semua pemangku kepentingan dalam pengumpulan dan penggunaan data terpilah gender/jenis kelamin, umur dan keberagaman (sex, age and diversity disaggregated data/SADDD) dan analisis gender dalam manajemen risiko bencana.
- Meningkatkan partisipasi dan kepemimpinan perempuan dan organisasi perempuan di tingkat regional, nasional dan mekanisme dan platform koordinasi PRB di tingkat lokal, nasional dan internasional;
- Meningkatkan kesadaran dan memperkuat kapasitas kelembagaan di pemerintah di berbagai level tentang integrasi kesetaraan gender dan inklusi sosial, dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana kebijakan;
- Memastikan kebutuhan khusus perempuan dan anak perempuan, termasuk penguatan kepemimpinan perempuan/anak muda. Intervensi social budaya dan ekonomi, pencegahan dan respon terhadap Kekerasan Berbasis Gender dan Kesehatan Reproduksi Seksual diprioritaskan dalam rencana PRB dalam kebijakan dan program lokal dan nasional;
- Memperkuat mekanisme koordinasi multipihak dalam Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana, memastikan keterlibatan sektor swasta, media massa, lembaga agama untuk aksi kemanusiaan untuk advokasi dan kemitraan yang lebih besar dalam memajukan kesetaraan gender dan inklusi sosial dan memastikan toleransi nol untuk kekerasan berbasis gender dan pelecehan seksual;
- Memperluas peluang perempuan untuk melanjutkan pendidikan dan pendidikan tinggi, dan meningkatkan kapasitas perempuan dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi untuk ketangguhan bencana dan perubahan iklim.

Kabar Perubahan YAPPIKA-ActionAid

Edisi 2/2022



www.yappika-actionaid.or.id

YAPPIKA-ActionAid

Jl. Basuki Rahmat RT 006 RW 010, Unit 7 (Kompleks Ruko YAMAHA), Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur 13410



Office

021 2101 8030
office@yappika-actionaid.or.id



Donor Care

021 5088 2929
donor.service@yappika-actionaid.or.id